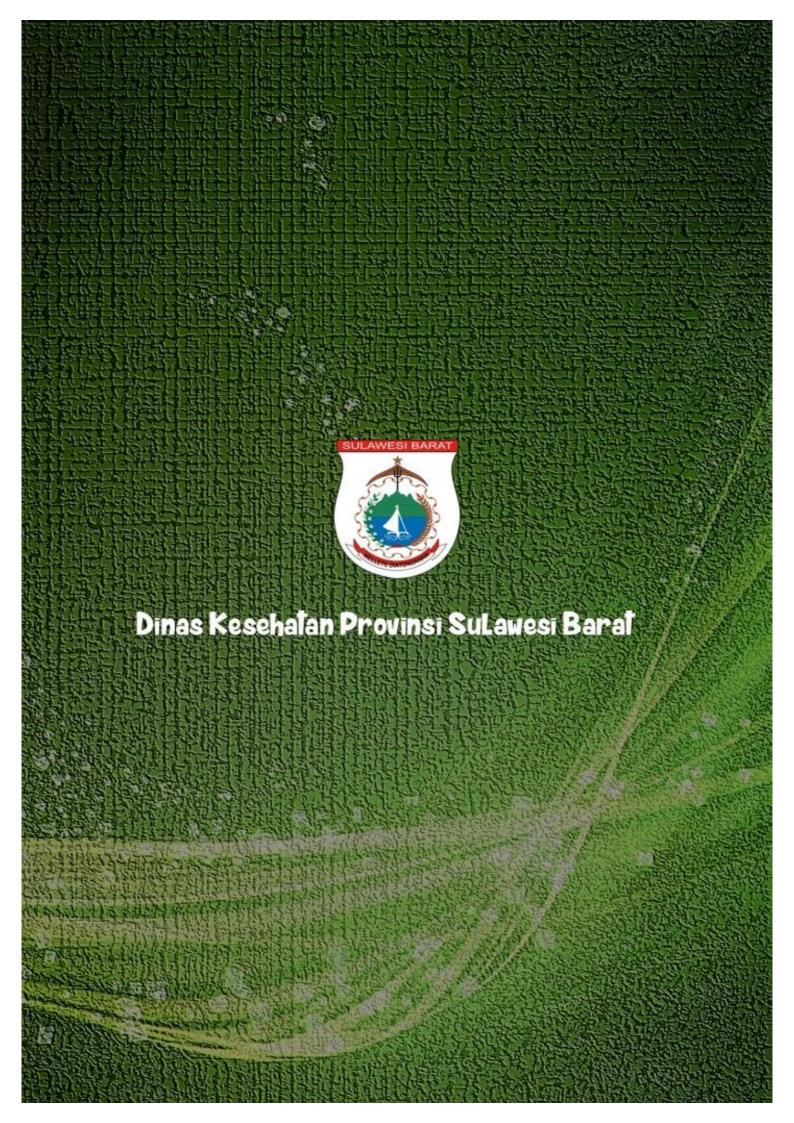


## Dīnas Kesehafan Provinsi SuLawesi Baraf

Laporan AkunfabiLilas Kinerja İnstansi Pemerintah (LKjIP)

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016

> Dinas Kesehatan Provinsi SuLawesi Barat Tahun 2017



#### KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhana Wa Taala atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016. LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Kesehatan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masingmasing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya

transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihakpihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Mamuju, 13 Februari 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAMESI BARAT

dr. H. Achmad Azis, M.Kes

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat secara bertahap ingin mencapai sasaran pembangunan kesehatan seperti telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 – 2016 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2016, yaitu meningkatkan akses dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup

Sejalan dengan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 s/d 2016 yaitu: " *Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Mandiri pada Tahun 2016*, maka dengan pertimbangan bahwa Sektor kesehatan merupakan sektor penting dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat . Visi provinsi Sulawesi Barat tidak akan terwujud apabila kondisi penduduk Provinsi Sulawesi Barat tidak sehat. Oleh karena itu sektor kesehatan perlu merencanakan aspek pembangunannya dengan sebaik - baiknya agar berbagai hambatan dan kendala terutama di sektor kesehatan dapat diatasi. Pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan sangat penting mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada saat ini semakin kompleks sejalan dengan permasalahan, perkembangan demokrasi, desentralisasi dan tuntutan globalisasi yang semakin meningkat.

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat maka Misi yang ditetapkan yaitu :

- 1. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
- 2. Mengupayakan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
- 3. Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standar
- 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut, maka pada tahun 2016 sasaran prioritas Dinas Kesehatan adalah layanan aksebilitas kesehatan Ibu dan Anak dan Peningkatan Cakupan Kualitas Air Baku, Sanitasi dan Air Bersih. Sasaran ini di uraikan dalam beberapa strategi Program di antaranya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan Penyakit Menular, Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat, Peningkatan mutu dan Standarisasi Pelayanan kesehatan, Penyehatan Lingkungan dan Penguatan dukungan Manajemen (Perencanaan dan Sistem Informasi Kesehatan).

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan 11 program utama dengan 35 kegiatan dan 5 program pendukung yang didukung anggaran APBD Provinsi sebesar Rp. 12.953.526.200,00

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan tersebut, menunjukkan capaian kinerja terhadap 11 sasaran dari 4 misi dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, rata-rata belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 yaitu: Menurunnya Angka Kematian ibu dan bayi, diukur dengan 5 indikator kinerja. Capaian indikator kinerja sasaran ini 92.93%. Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan belum ada yang mencapai mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Persentase Ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan kesehatan (Cakupan K4), Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) dan cakupan Pelayanan Kesehatan bayi.

Sasaran 2 yaitu: Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan. Ada 3 indikator kinerja untuk menilai sasaran-2 dengan capaian indikator kinerja sebesar 99.69%. Dari 3 indikator tersebut, sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan. Indikator yang tercapai adalah Persentase RS Provinsi /Kabupaten yang menerapkan SPM Rumah Sakit. Indikator yang tidak tercapai yaitu: Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi dan Puskesmas rawat inap yang mampu Poned.

Sasaran 3 yaitu: Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016. Ada 2 indikator kinerja untuk menilai sasaran tersebut . Nilai kinerja sasaran ke 3 sebesar 95.55% , dari 2 indikator kinerja yang ada, sebanyak 1 indikator belum memenuhi target yang telah ditentukan. Indikator yang tidak mencapai target adalah: Persentase balita ditimbang berat badannya

Sasaran 4 adalah: Meningkatnya Perilaku Hidup bersih dan sehat. Indikator kinerja untuk menilai sasaran tersebut ada 2 indikator. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini 70,14%. Dari 2 indikator kinerja yang ada, belum ada yang memenuhi target yang ditetapkan. Indikator yang dimaksud adalah Persentase RT ber-PHBS dan Persentase Desa Siaga Aktif

Sasaran 5 adalah: Menurunnya Angka Penyakit Menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya. Terdapat 4 Indikator kinerjaRata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini adalah 76,51% dan dari 4 indikator kinerja belum ada yang mencapai/melebihi target yang ditentukan dan tidak ada indikator yang mencapai target. Indikator pada sasaran ke 5 adalah Angka penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk, Persentase Kasus TB Baru (BTA +) yang ditemukan, Persentase Desa UCI dan Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

Sasaran 6 adalah: Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standard dan terjangkau oleh masyarakat. Terdapat 1 indikator pada sasaran ini. Capaian indikator kinerja sasaran ini 86,93%, Dari indikator kinerja belum mencapai target yang ditentukan. Secara umum capaian semua indikator pada sasaran meningkatnya kualitas instutusi pendidikan di Sulawesi Barat dapat dicapai sesuai dengan target bahkan melebihi. Untuk capaian kinerja Persentase ketersediaan Obat dan vaksin sebesar 86,93 %.

Sasaran 7 yaitu: Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas Manajemen dan Perencanaan Bidang Kesehatan dengan capaian kinerja 75%%. Terdapat 4 indikator Kinerja pada sasaran ini yaitu Dokumen Perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar dan Persentase Kab yang melaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah. Indikator pada sararan ini tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Terdapat satu indikator yang tidak terealisasi sama sekali yakni penyusunan PHA /DHA Provinsi dan kabupaten setiap tahunnya.

Sasaran 8 yaitu: Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan dengan capaian kinerja 6. Terdapat 1 indikator Kinerja pada sasaran ini yaitu Teregistrasinya SDM kesehatan. Indikator pada sararan ini belum tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Pada indikator ini capaian Kinerjanya sebesar 64,28%.

Sasaran 9 yaitu: Sasaran Strategis 9 Tersusunnya data dan informasi Kesehatan yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat waktu. Capaian Kinerja pada sasaran ini sebesar 100%. Terdapat 1 indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu Persentase Kab dan prov memiliki Profil Kesehatan menurut jenis Kelamin dan tercapai 100%.



#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Dalam pelayanan di bidang Kesehatan, peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

- A. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), yang menempatkan periode 2015-2019 sebagai tahapan ketiga untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.
- B. Undang-undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia.
- C. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat dengan pembangunan kesehatan nasional.
- D. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat
- E. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat 2012 2016.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

#### **B.** LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- A. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- C. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:

- A. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
- B. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
- C. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

#### D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas untuk membantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan
dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Barat yaitu "Terwujudnya
percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Sulawesi
Barat tahun 2016" dan Misi Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah. Misi ini terfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi dan etos profesional aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi yang diemban SKPD.
- 2. Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. Misi ini terfokus pada pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan yang kesemuanya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati berbagai unsur masyarakat.
- 3. Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagaii upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.

- 4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang utuh dan terpadu, khususnya pada penerapan kurikulum nasional berbasis sekolah, pembinaan moral, budi pekerti, karakter, bahasa, emosional, estetika serta sikap beragama dan spiritual, apresiasi seni-budaya dan pengembangan kreativitas pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender.
- 5. Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini terkait dengan upaya pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan kebijakan yang menjamin daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan

Berdasarkan pada visi dan misi diatas maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2011-2016 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut diatas.

Berdasarkan Tupoksi SKPD maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung pelaksanaan misi *Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup.* Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016, disusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 sebagaimana dijabarkan

dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Kota Provinsi Sulawesi Barat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga dimaksudkan sebagai aplikasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

#### A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh:

- 1. Sekretaris
- 2. Bidang Bina Gizi dan KIA
- 3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar
- 4. Bidang Bina P2KL
- 5. Bidang Pelayanan Farmasi dan Jaminan Kesehatan

Sekretaris dan Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat yaitu Intalasi Farmasi dan Poliklinik Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi barat.

Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :

- 1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2. Penyelenggaraan bidang urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan
- 4. Penyelenggaran pengkoordinasian dan pembinaan UPTD

#### B. Struktur Organisasi

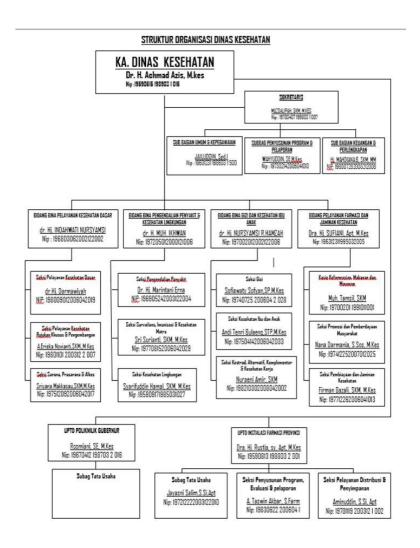
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuaii Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kepala Dinas kesehatan dibantu oleh :

 Sekretariat, membawahi Sub bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian penyusunan program dan pelaporan, dan sub bagian keuangan dan perlengkapan.

- 2. Bidang Bina gizi dan Kesehatan Ibu Anak membawahi Seksi gizi dan Seksi kesehatan ibu anak, dan Seksi kestrad, alternatif, komplementer dan kesehatan kerja.
- 3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar membawahi Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Seksi Pelayanan Kesehatan, Rujukan khusus dan Pengembangan, Seksii Sarana, Prasarana, B. Alkes
- 4. Bidang Bina Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan lingkungan membawahi Seksii Pengendalian Penyakit, Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra, dan Seksii Kesehatan Lingkungan.
- 5. Bidang Pelayanan Farmasi dan Jaminan Kesehatan membawahi Seksi Kefarmasian makanan dan minuman, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksii Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

#### 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas:

- a. UPTD Instalasi Farmasi Provinsi, membawahi Subag Tata Usaha, Seksii Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, dan Seksi Pelayanan, Distribusi dan Penyimpanan.
- b. UPTD Poliklinik Gubernur, membawahi Subag Tata Usaha.



#### D. FUNGSI STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat

Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

#### E. FUNGSI STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan di Sulawesi Barat.

Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

- Meningkatkan akses/ jangkauan pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat
- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat.

#### F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS KESEHATAN

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 - 2016 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, MDG's dan RAD PG) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut:

#### 1. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di Sulawesi Barat. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2016 sebanyak 52 namun AKI di Sulawesi Barat masih fluktuatif, disebabkan masih banyaknya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunyai kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan kasus kematian bayi yang antara lain disebabkan asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif.

Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan kesehatan ibu dan bayi/ anak di puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayann kesehatan di Sulawesi Barat jika dibandingkan dengann jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar.

Peran suami siaga dalam penurunan angka kematian ibu perlu lebih ditingkatkan dengan keikutsertaan suami dalam kelas ibu hamil. Masih kurangnya partisipasi wanita dalam merencanakan suatu persalinan dan mengambil keputusan (memutuskan siapa penolong persalinan, dimana tempat melahirkan, alat kontrasepsi yang akan digunakan pasca melahirkan, dll) masih menjadi otoritas suami. Masih adanya gender stereotype (lak-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan) dan anggapan masyarakat bahwa masalah kehamilan dan persalinan menjadi urusan wanita dan merupakan hal yang biasa. Perlu dukungan dan perhatian suami terhadap kehamilan dan persalinan seorang istri.

#### 2. Akses Sanitasi dan air yang masih rendah

Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman berkontribusi terhadap 88 persen kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Bagi anak-anak yang bertahan hidup, seringnya menderita diare berkontribusi terhadap masalah gizi, sehingga menghalangi anak-anak untuk dapat mencapai potensi maksimal mereka. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan implikasi serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Di Sulawesi Barat, diare masih merupakan permasalahan kesehatan yang cukup besar. Laporan Riskesdas 2013 menunjukkan isnsiden diare di Provinsi Sulawesi Barat lebih tinggi dibandingkan rata – rata angka nasional. Selain itu diare juga ditengarai sebagai penyebab 31 persen kematian anak usia antara 1 bulan hingga satu tahun, dan 25 persen kematian anak usia antara satu sampai empat tahun. Angka diare pada anak-anak dari rumah tangga yang menggunakan sumur terbuka untuk air minum tercatat 34 persen lebih tinggi dibandingkan dengan

anak-anak dari rumah tangga yang menggunakan air ledeng, Selain itu, angka diare lebih tinggi sebesar 66 persen pada anak-anak dari keluarga yang melakukan buang air besar di sungai atau selokan dibandingkan mereka pada rumah tangga dengan fasilitas toilet pribadi dan septik tank (Unicef).

#### **BAB II**

#### PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk menjalankan peran penting kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsii Sulawesi Barat memiliki visi yaitu:

# "Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan Mandiri pada tahun 2016".

Untuk mendukung Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) misi:

- 1. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
- 2. Mengupayakan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
- 3. Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standar
- 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

#### A. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan pada Tahun 2016 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sulawesi Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan 15 program pokok dan rutin dengan total anggaran sebesar Rp. 12.953.526.200,- digunakan untuk program wajib dan program pendukung Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/ sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Kesehatan dengan Gubernur Tahun 2016.

#### B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Indikator sasaran	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2016	KET
1	2	3	4
Menurunnya Angka Kematian Ibu	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	70	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan	86,2	
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K4)	78,3	
Rumah sakit terakreditasi	Persentase RS yang terakreditasi	60	
Rumah sakit menerapkan Standar pelayanan minimal Rumah Sakit	Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS	75	
Puskesmas perawatan mampu Poned	Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	52	
Menurunnya Angka Kematian Bayi	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	90	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	90	
Menurunnya Angka Kematian Balita	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	87,6	
Prevalensi Gizi buruk menurun	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	91,44	
	Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100	
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 80 pada	Persentase RT ber -PHBS	80	
Cakupan Persentase Desa	Persentase Desa Siaga Aktif	70	

Siaga Aktif		
Cakupan Sekolah Dasar mempromosikan Kesehatan pada	Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan	35
Angka penemuan kasus malaria berkurang	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk	1,5
Kasus TB Paru (BTA +) ditemukan berkurang	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	75
Persentase Desa UCI mencapai 100 persen	Persentase desa UCI meningkat	100
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat tiap tahunnya	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	80
Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	melaksanakan pembinaan	100
Tersedianya obat dan vaksin disarana kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin	100
Dokumen perencanaan dan anggaran tersususn sesuai standar	Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	100
Kabupaten DBK mendapatkan fasilitasi penanguulangan DBK	Persentase kabupaten dengan daerah bermasalah Kesehatan (DBK) mendapat fasilitasi Penanggulangan DBK	100
Kabupaten yang melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah	Persentase Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin	100
Provinsi dan Kabupaten menyusun PHA dan DHA	Persentase provinsi dan kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahunnya	83
Tenaga kesehatan yang lulus	Teregistrasinya tenaga kesehatan	70

uji komptetensi berisin		
Kabupaten dan Provinsi meyusun Profil kesehatan tiap tahun dan memiliki bank data kesehatan	100%	

#### C. PERJANJIAN KINERJA

Indikator sasaran	Indikator Kinerja Program	Perjanjian Kinerja	КЕТ
1	2	3	4
Menurunnya Angka Kematian Ibu	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	70	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan	86,2	
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K4)	78,3	
Rumah sakit terakreditasi	Persentase RS yang terakreditasi	60	
Rumah sakit menerapkan Standar pelayanan minimal Rumah Sakit	Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS	75	
Puskesmas perawatan mampu Poned	Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	52	
Menurunnya Angka Kematian Bayi	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	90	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	90	
Menurunnya Angka Kematian Balita	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	87,6	
Prevalensi Gizi buruk menurun	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	91,44	

	Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 80 pada	Persentase RT ber -PHBS	80
Cakupan Persentase Desa Siaga Aktif	Persentase Desa Siaga Aktif	70
Cakupan Sekolah Dasar mempromosikan Kesehatan pada	Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan	35
Angka penemuan kasus malaria berkurang	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk	1,5
Kasus TB Paru (BTA +) ditemukan berkurang	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	75
Persentase Desa UCI mencapai 100 persen	Persentase desa UCI meningkat	100
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat tiap tahunnya	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	80
Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	melaksanakan pembinaan	100
Tersedianya obat dan vaksin disarana kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin	100
Dokumen perencanaan dan anggaran tersususn sesuai standar	Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	100
Kabupaten DBK mendapatkan fasilitasi penanguulangan DBK	Persentase kabupaten dengan daerah bermasalah Kesehatan (DBK) mendapat fasilitasi Penanggulangan DBK	100
Kabupaten yang melaksanakan Jaminan	Persentase Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan	100

Pelayanan Kesehatan Daerah	Kesehatan Masyarakat miskin		
Provinsi dan Kabupaten menyusun PHA dan DHA	Persentase provinsi dan kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahunnya	83	
Tenaga kesehatan yang lulus uji komptetensi berisin	Teregistrasinya tenaga kesehatan	70	
Kabupaten dan Provinsi meyusun Profil kesehatan tiap tahun dan memiliki bank data kesehatan	•	100%	

Jumlah anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bersumber APBD Provinsi 2016 sebesar Rp. 12.953.526.200,- (Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga dua juta lima ratus dua puluh enam dua ribu rupiah) sedangkan jumlah anggaran bersumber APBN/Dekonsentrasi sebesar Rp. 35.847.448.000,- (Tiga Puluh lima milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah ) sehingga jumlah seluruh anggaran sebesar Rp. 48.800.974.200,- (Empat puluh delapan milyar delapan ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sempat ribu dua ratus rupiah ).

#### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016**

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, setidaknya terdapat 9 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

### 1. Sasaran 1 (sasaran 1 pada Misi 1): Menurunnya Angka Kematian Ibu dari dari 185 per 100000 kelahiran hidup menjadi 102 per 100000 kelahiran hidup pada tahun 2016

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

				2015		2016		
NO	SASARAN STRATE GIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	2	3	5	6	7	8	9	1
1		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	67	57,75	86,19	70	71,83	102,6
2	Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 185 per 100000 kelahiran hidup menjadi 102 per 100000 kelahiran hidup	Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,2	87,75	101,79	86,2	80,44	93,42
3		Persentase Ibu hamil yang mendapatkan Pelaanan Antenatal (Cakupan K4)	78,3	78,19	99,85	78,3	75,02	95,81
4	2016	Cakupan kunjungan Neonatal Pertama	90	87,80	97,55	90	68,6	76,22
5		Cakupan pelayanan Kesehatan bayi	90	88,80	98,66	90	86,96	96,62
	Rata-rata Capaian Sasaran1				96,81			92,93

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini 92,93%, Dari 5 indikator kinerja, hanya satu yang telah mencapai/melebihi target yang ditentukan. Secara umum semua indikator pada sasaran

Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 185 per 100000 kelahiran hidup menjadi 102 per 100000 kelahiran hidup pada tahun 2016 belum mencapai terget yang diharapkan. Indikator sasaran, namun Angka Kematian Ibu apabila dilihat trend per tahun sangat fluktuatif, sehingga masih menjadi prioritas utama masalah kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Simpul penyebab meningkatnya angka kematian ibu adalah: status kesehatan ibu dan calon ibu yang masih rendah; meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan; kompetensi bidan desa masih kurang; jumlah dan penyebaran dokter tidak merata; jumlah Puskesmas rawat inap sebesar 46,31% (44 dari 95 Puskesmas) belum semua rumah sakit memiliki dokter spesialis kebidanan dan kandungan; belum optimalnya pendayagunaan tenaga medis lain (spesialis anestesi, penyakit dalam, anak) yang ada di rumah sakit dalam penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri. Jumlah kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebanyak 52 kasus kematian. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang hanya 42 kasus.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu diantaranya: di tingkat Provinsi, 1) Dinas Kesehatan Provinsi membentuk tim *audit external* dari campion dan mentor untuk ditugaskan melakukan review/ audit kematian ibu, 2) *Mapping* alur system rujukan yang melibatkan semua fasilitas kesehatan (Rumah sakit & Puskesmas) diikat perjanjian kerjasama system rujukan kegawatdaruratan ibu & bayi baru lahir 3) Membangun dialog Bupati dan Kadinkes, Direktur RS dan para dokter spesialis kebidanan, anak,

dll untuk perbaikan pelayan. Kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, 4) Menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1 dari Misi 1 tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 96,81 dan pada tahun 2015 sebesar 92,93, 6) Meningkatkan upaya promosi kesehatan pencegahan kematian ibu dengan penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak, serta meningkatkan kemampuan strategi promosi kesehatan penurunan AKI (dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev) bagi petugas promkes dan kepala puskesmas.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, Dinas Kesehatan telah tercapaipada tahun 2016 merupakan tahun terakhir Rencana Strategis Tahun 2012-2016, ini berarti belum melampaui target yang ditetapkan.

Penggunaan sumber daya keuangan APBD Provinsi untuk pencapaian Sasaran adalah sebesar Rp 504.730.000,- atau 3,90% dari total pagu sebesar Rp. 12.953.526.200-. Pada tahun 2016 terdapat pengurangan anggaran APBD tahun 2016 dari Rp 766.800.000,- menjadi Rp 504.730.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan antara

#### lain adalah:

- 1. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar
- 2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- 3. Kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat

### 2. Sasaran 2 : Terselenggaranya Standarisasi dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

capaian indikator kinerja sebesar 99.69%. Dari 3 indikator tersebut, sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan. Indikator yang tercapai adalah Persentase RS Provinsi /Kabupaten yang menerapkan SPM Rumah Sakit. Indikator yang tidak tercapai yaitu: Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi dan Puskesmas rawat inap yang mampu Poned.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

			2015			2016		
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	60	50	83,33	60	57,14	95,23

	pelayanan							
2		Persentase RS Provinsi /Kabupaten yang menerapkan SPM Rumah Sakit	75	50	66,66	75	75	100
3		Puskesmas rawat inap yang mampu Poned	40	55	125	52	54	103,84
	Rata – Rata capaian Sasaran 2				91.67			99.69

Secara umum capaian sebagian indikator pada sasaran Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan di Sulawesi Barat dapat dicapai sesuai dengan target. Dari 3 indikator sebanyak 2 indikator telah mencapai target dan 1 indikator belum memenuhi target. Capaian kinerja yang belum memenuhi target yaitu Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi yang baru mencapai 57,14.

Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi tahun 2016 mengalami peningkatan dari 50 Persen pada tahun 2015 menjadi 57,14 di tahun 2016, demikian juga Puskesmas rawat inap yang mampu Poned menurun dibanding tahun 2015 sebesar 55 menjadi 54 % di tahun 2016

Persentase RS Provinsi /Kabupaten yang menerapkan SPM Rumah Sakit juga mengalami peningkatan dari 66,66% menjadi 75% pada tahun 2016.

Persentase Rumah sakit yang terakreditasi yang belum belum mencapai target, hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 rata –

rata Rumah Sakit sementara berproses untuk mendapatkan akreditasi dari komite Akreditasi rumah Sakit.

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang untuk menjadikan Rumah sakit yang terakreditasi mencapai terget dapat mengusulkan anggaran pengembangan Rumah Sakit lewat Dana Alokasi Kesehatan/ DAK dengan data yang kuat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain itu provinsi Sulawesi Barat juga telah berupaya untuk mengadvokasi kab untuk mendorong Rumah Sakit dalam mendorong Rumah Sakit terakreditasi dan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Secara umum capaian indikator terhadap peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat sudah sesuai target. Untuk indikator Kinerja Rumah sakit yang terakreditasi pada tahun 2016 telah didapatkan oleh RSUD Majene, RSUD Polewali Mandar, RSUD Mamuju dan RSU Regional Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2017 RSUD Mamuju Utara, RSUD Mamasa dan RSUD Mamuju Tengah di dorong untuk mendapatkan akreditasi.

Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang untuk meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit diantaranya:

- Mengembangkan jejaring sistem rujukan yang dimulai dari pelayanan dasar sampai dengan pelayanan rujukan dengan melibatkan sektor kesehatan dan lintas sektor terkait,
- Dalam rangka pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di RS dengan mengembangkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang harus dilakukan secara

real time sehingga dapat memberikan informasi yang up to date dan data dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2 adalah sebesar Rp. 1.265.539.400,- atau 9,77 % dari total pagu sebesar Rp. 12.953.526.200,00,-, Pada tahun 2016 terdapat penambahan pagu anggaran terhadap Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dari Rp. 1.125.000.000,- pada DPA Pokok menjadi 1.265.539.400,-

Keberhasilan pencapaian sasaran 3, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Standarisai Pelayanan Kesehatan.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dari pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 99,69 % dan pada tahun 2015 sebesar 91,67%.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan telah tercapai 99,69%, ini berarti telah belum mencapai terget melampaui target yang ditetapkan.

Kegiatan – kegiatan dalam mendukung Sasaran 2 ini di antaranya :

- 1. Perencanaan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
- 2. Monitoring dan Evaluasi Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan
- 3. Peningkatan Program PONEK di Rumah Sakit
- 4. Pelatihan Perawatan Pelaksana Perkesmas

- 5. Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dasar
- 6. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan di daerah terpencil perbatasan dan kepualauan (DTPK) dan lokasi bangunmandar
- 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan DTPK

# 3. **Sasaran 3 Yaitu** Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016.

Capaian kinerja pada sasaran 3 dapat dilihat sebagai berikut:

N	10	SASARAN	INDIKATOR		2015			2016		
		STRATEGIS	KINERJA	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	
		Menurunkan	Persentase Balita							
	1	prevalensi	ditimbang	79,92	75,5	94,46	91,44	83,31	91,11	
		Gizi buruk dari 20,5 pada	berat							
		uai i 20,5 paua	Persentase							
		tahun 2011	Balita Gizi							
	2	menjadi 15,4	Buruk	100	100	100	100	100	100	
	2	pada tahun	mendapat	100	100	100	100	100	100	
		2016	Perawatan							
		Rata-rata Ca	paian Sasaran 3			97,23			95.55	

Sasaran 3 yaitu: Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016. Kinerja sasaran ini sebesar 95.55 pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 97.23. Ada 2 indikator kinerja untuk menilai sasaran tersebut, dari 2 indikator

kinerja yang ada, sebanyak 1 indikator belum memenuhi target yang telah ditentukan. Indikator yang tidak mencapai target adalah: Persentase balita ditimbang berat badannya. Target yang ditetapkan sebesar 91.44% dan yang tercapai 83.31% sehingga capaian kinerjanya sebesar 91.11%.

Secara umum capaian indikator pada sasaran Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016. di Sulawesi Barat dapat dicapai sesuai dan cenderung lebih dengan target.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dari pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penuruna . Pada tahun 2016 sebesar 123,58 % dan pada tahun 2015 sebesar 150,88%.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan telah tercapai ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Saat ini Provinsi Sulawesi Barat menduduki peringkat kedua di Indonesia sebagai Provinsi untuk persentase balita dengan kondisi gizi buruk dan kurang yang tinggi . Prevalensi gizi buruk dan kurang nasional tahun 2016 sebesar 18,8 (PSG 2015) sedangkan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 24,7.

Meskipun sempat mengalami penurunan dari 29,1% pada tahun 2015 menjadi Angka ini menunjukkan Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah penderita Gizi buruk dan kurang yang tertinggi di Pulau Sulawesi Barat.

Penderita Gizi buruk dan kurang bisa dicegah. Salah satunya yaitu melalui pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil harus terpantau kesehatannya serta mendapatkan makanan yang cukup gizi. Namun, 43% ibu hamil hanya mengkonsumsi makanan kurang dari tiga kali per hari. Alasannya

adalah karena mual, tidak nafsu makan, atau takut jika makan terlalu sering dan dengan jumlah yang banyak, bisa-bisa janinnya akan berukuran besar dan sulit melahirkan

Suplementasi zat gizi (tablet zat besi atau Fe) juga sangat penting agar terhindar dari anemia saat hamil dan pendarahan saat melahirkan. Tetapi kepatuhan ibu hamil untuk meminum tablet tambah darah hanya sebesar 33%. Padahal mereka harus minimal mengkonsumsi 90 tablet selama kehamilan. Selain itu, pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu juga sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan khususnya stunting.

Beberapa hasil survey di atas menunjukkan tidak semua calon ibu memiliki pengetahuan gizi dan kesehatan yang cukup. Dan lagi, tidak semua ibu memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi untuk memahami gizi dan kesehatan.

Di sinilah peran Posyandu dalam melakukan edukasi pengetahuan gizi termasuk gerakan nasional sadar gizi. Posyandu sendiri merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan. Peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan dapat dilakukan melalui penyuluhan di Posyandu. Kegiatan ini sebenarnya telah diatur pada salah satu meja kader pada setiap kegiatan Posyandu, yaitu pada meja keempat. Namun, praktiknya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Posyandu perlu strategi dalam peningkatan kualitas pelayanannya. Salah satunya dengan memperbaiki pelayanan melalui kader yang telah disesuaikan dan melengkapi sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Posyandu.

Posyandu bisa menciptakan kegiatan inovatif dan kreatif sebagai kegiatan tambahan untuk meningkatkan daya tarik pelayanan sehingga kualitas Posyandu semakin meningkat. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat, khususnya para ibu, sehingga frekuensi kedatangannya setiap bulan lebih tinggi karena merasakan manfaatnya. Kesadaran gizi masyarakat pun bisa meningkat.

Strategi ini akan berhasil apabila ada upaya intensif untuk meningkatkan komitmen, kesadaran dan sikap petugas kesehatan, peran keluarga dan masyarakat, serta kolaborasi berbagai pihak. Dengan begitu tercipta Posyandu dengan kualitas pelayanan maksimal yang menjadikan Ibu sehat, cerdas dan berpengetahuan gizi baik. Para ibu yang seperti ini akan memiliki anak yang tumbuh optimal dan menggenggam masa depan bangsa yang cemerlang.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3 adalah sebesar Rp. 599.525.000,- atau 4,63 % dari total pagu sebesar Rp. 12.953.526.200,00,-, Pada tahun 2016 terdapat pengurangan pagu anggaran terhadap Program Perbaikan Gizi Masyarakat dari Rp. 870.470.000,- pada DPA Pokok menjadi 599.525.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran 3, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Perbaikan Gizi Masyarakat dan berhubungan dengan Program Keselamatan Melahirkan Ibu dan Anak dan Program Promosi kesehatan Masyarakat.

Kegiatan – kegiatan dalam mendukung Sasaran 2 ini di antaranya :

 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pemetaan Masalah Gizi di Daerah Bangun Mandar

- 2. Pelatihan Motivator ASI
- 3. Kapasitas Petugas dalam Pembentukan Kelompok Pendukung PMBA

## 4. Sasaran 4 : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan 1 indikator yang tidak mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut :

Capaian kinerja pada sasaran 3 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR		20		2016				
	STRATEGIS	KINERJA	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya Perilaku	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	75	63,1	84,13	80	63,1	78,88		
2	Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Desa Siaga Aktif	68	76	111,76	80	49,40	61,75		
	Rata-rata (	Capaian Misi 1			97,94			70.14		

Sasaran 3 yaitu: Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Ada 2 indikator kinerja untuk menilai sasaran tersebut, dari 2 indikator kinerja yang ada, sebanyak belum ada memenuhi target yang telah ditentukan. Indikator yang tidak mencapai target adalah: Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Persentase Desa Siaga Aktif.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 4 dari pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan . Pada tahun 2016 sebesar 70,14 % dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 97,94 %

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan telah tercapai ini belum melampaui target yang ditetapkan. Perlu kerja keras untuk mencapai indikator kinerja pada sasaran yang ke 4.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4 melaui Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar Rp. 96.960.001,00,- atau 0,74 % dari total pagu sebesar Rp. 12.953.526.200,00,-.

Kegiatan – kegiatan dalam mendukung Sasaran 4 ini di antaranya adalah dengan Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan.

# 5. Sasaran 5 : Mencegah, menrunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya dengan 5 indikator yang tidak mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut :

Capaian kinerja pada sasaran 5 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR		20	15		20	16
NO	STRATEGIS	KINERJA	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1		Angka penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk	1.5	<1.5	100	1.5	<1.5	100
2	Moncogah	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	75	34	45,33	75	45	60
	Mencegah, menrunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya	Persentase desa UCI meningkat	100	70,5	70,5	100	79,8	79,8
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	75	42,7	56,93	80	47	58,75
		Persentase Kabupaten melaksanakan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Obat Tradisional	100	84	84	100	84	84
	Rata-rata Ca	paian Sasaran 5			71,39			76,51

Sasaran 5 yaitu: Mencegah, menrunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya. Ada 5 indikator kinerja untuk menilai sasaran tersebut, dari 5 indikator kinerja yang ada, sebanyak 4 Indikator belum memenuhi target yang telah ditentukan. Indikator yang tidak mencapai target adalah: Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan, Persentase desa UCI meningkat, Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan Persentase Kabupaten melaksanakan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Obat Tradisional.

Sedangkan indikator yang telah mencapai target adalah Angka Penemuan kasus malaria per 1000 penduduk. Target yang ditetapkan adalah 1, per 1000 penduduk dan capaiannya telah kurang dari 1,5 per 1000 penduduk.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 5 dari pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkstsn. Pada tahun 2016 sebesar 76,51 % dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 71,39%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan telah tercapai ini belum melampaui target yang ditetapkan. Perlu kerja keras untuk mencapai indikator kinerja pada sasaran yang ke 5. Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5 melalui 3 Program Utama yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat.Besaran dana yang di alokasikan untuk sasaran ke 5 sebesar Rp 492.667.300,- atau 3,80 % dari total pagu sebesar Rp. 12.953.526.200,00,-.

Kegiatan – kegiatan dalam mendukung Sasaran 4 ini di antaranya adalah dengan: Pelacakan Kasus Malaria, Fasilitasi Cold Room, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan program Kesetradkom, Pemicuan Jamban Sehat dan Pertemuan jejaring STBM

# 6. Sasaran 6 : Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan 1 indikator yang tidak mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut :

Capaian kinerja pada sasaran 5 dapat dilihat sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR		20	15	2016				
	STRATEGIS	KINERJA	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat lainnya	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100	60	60	100	86,93	86,93		
	Rata-rata Ca	paian Sasaran 6			60			86,93		

Sasaran 6 yaitu: Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat lainnya. Ada 1 indikator kinerja untuk menilai sasaran tersebut, Indikator belum memenuhi target yang telah ditentukan.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 6 dari pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatsn. Pada tahun 2016

sebesar 86,93 % dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 60%. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan telah ini belum melampaui target yang ditetapkan. Perlu kerja keras untuk mencapai indikator kinerja pada sasaran yang ke 6.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6 melalui Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp 7.791.515.000,- atau 60,15 % dari total pagu sebesar Rp. 12.953.526.200,00,-.

Kegiatan – kegiatan dalam mendukung Sasaran 4 ini di antaranya adalah dengan: Pemantauan indikator Penggunaan Obat Rasional (Ispa Non Pnemonia, Diare Pemantauan ketersediaan obat dan Vaksin on Spesifik, Myalgia ) di PKM Perawatan, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat dan Dukungan Dana DAK (Pelayanan Kefarmasian).

# 7. Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Perencanaan Kesehatan dengan 4 indikator, dengan penjelasan sebagai berikut :

Capaian kinerja pada sasaran 5 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR		20	15		20	16
	STRATEGIS	KINERJA	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Dokumen						
	Meningkatnya	Perencanaan			100			
1	Kualitas Manajemen dan	dan Anggaran	100	100		100	100	100
1	Perencanaan	tersusun sesuai						
	Kesehatan	standar						
		Persentase						
		kabupaten						100
		daerah DBK						
2		mendapat	100	100	100	100	100	
		fasilitasi						
		penanggulangan						
		DBK						
		Persentase						
		kabupaten						
		melaksanakan						
3		Jaminan	83	100	120,48	100	100	100
		Pelayanan			,			
		Kesehatan						
		masyarakat						
		miskin						

4	Persentase Provinsi dan kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahunnya	67	0	0	83	0	0
	Rata-rata Capaian Sasaran 7			80,12			75

Sasaran 7 yaitu: Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Perencanaan Kesehatan. Ada 5 indikator kinerja untuk menilai sasaran tersebut, dan terdapat Indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 7 dari pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatsn. Pada tahun 2016 sebesar 75 % dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 80,12%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan telah ini belum mencapai target yang ditetapkan.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 7 melalui Program Kebijakan dan Management Pembangunan kesehatan dan Program dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp 254.083.000,,- atau 1,96 % dari total pagu sebesar Rp. 12.953.526.200,00,-.

Kegiatan – kegiatan dalam mendukung Sasaran 4 ini di antaranya adalah dengan: Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Tk. Provinsi, Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Money Laporan Keuangan dan Aset Negara, dan Kalakarya Kesehatan.

### 8. Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan dengan 1 indikator, dengan penjelasan sebagai berikut :

Capaian kinerja pada sasaran 8 dapat dilihat sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR		20	15	2016				
	STRATEGIS KINERJA		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan	Teregistrasinya Tenaga Kesehatan	65	20	30,76	70	45	64,28		
	Rata-rata Ca	paian Sasaran 8			30,76			64,28		

Sasaran 8 yaitu: Meningkatnya Kualitas Seumber Daya Kesehatan. Ada 1 indikator kinerja untuk menilai sasaran tersebut, dan belum memenuhi target yang telah ditentukan. . Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 8 dari pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 64,28 % dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 30,76%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan telah ini belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan untuk indikator kinerja teregistrasinya tenaga kesehatan di bawahi oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Dinas Kesehatan hanya mengusulkan saja usulan yang masuk

## 9. Sasaran 9 : 100 Persen kabupaten memiliki Profil Kesehatan menurut jenis Kelamui, dengan penjelasan sebagai berikut :

Capaian kinerja pada sasaran 9 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR		20	15	2016				
	STRATEGIS	KINERJA	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
1	Tersusunnya data dan Informasi Kesehatan yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat waktu	100 Persen kabupaten memiliki Profil Kesehatan menurut Jenis Kelamin	100	100	100	100	100	100		
	Rata-rata Ca	paian Sasaran 7			80,12			75		

Sasaran 9 yaitu: Tersusunnya data dan Informasi Kesehatan yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat waktu, dan telah memenuhi target yang telah ditentukan. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 9 dari pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sama yakni 100 persen.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan telah ini mencapai target yang ditetapkan.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 9 melalui Program Pengembangan Sistem Informasi kesehatan sebesar Rp 61.230.000,,-atau 0,47% dari total pagu sebesar Rp. 12.953.526.200,-.

#### **B.** CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2016, di dukung dengan anggaran APBD(P) Provinsi sebesar Rp. 12.953.526.200,- dengan rincian :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.,- 1.170.875.599,-
- 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Rp. 343.835.000,,-
- 3. Program Peningkatan Kapapaisitas sumber Daya Aparatur Rp.128.700.000,00,-
- 4. Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 280.070.000,-
- 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 7.791.515.000,-
- 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 44.600.000,00
- 7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 96.960.001,00
- 8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 599.525.000,00
- 9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 317.817.300,00
- 10. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Rp. 130.250.000,00,-
- 11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp., 1.265.539.400,-
- 12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp504.730.000,00
- 13. Program Kebijakan dan Management Pembangunan kesehatan Rp229.173.900,0
- 14. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp60.705.000 Kesehatan
- 15. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rp 61.230.000,-

Selain anggaran bersumber APBD Provinsi, Dinas Kesehatan juga mendapatkan anggaran APBN (Dekonsentrasi) sebanyak Rp. 35.847.448.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	Program	PAGU
1	Program Kebijakan dan Manajemen	Rp 2.946.706.000
2	Program Kesehatan Masyarakat	Rp 15.840.800.000
3	Program pelayanan Kesehatan	Rp 6.221.070.000
4	Program Pengendalian Penyakit	Rp 6.491.439.000
5	Program Pelayanan Obat	Rp 1.246.607.000
6	Program Pengembangan SDM kesehatan	Rp 3.100.826.000

Penggunaan anggaran langsung APBD Provinsi apabila diperinci dalam mendukung Anggaran APBD Provinsi untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 12.953.526.200,- digunakan untuk program wajib dan program pendukung. Dari sisi penyerapan anggaran tahun 2016, sebesar Rp. 9.942.382.102,- (76,75).

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori baik Baik Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai baik dengan rata – rata capaian 9 sasaran sebesar 84,89%,

Anggaran APBD Provinsi untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.12.953.526.200 dari sisi penyerapan anggaran tahun 2016, sebesar Rp. 9.942.382.102,- (76,75).

#### **B.** Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas kesehatan dimasa mendatang antara lain :

 Perlu upaya sinkronisasi dan pola operasional dalam pelaksanaan program dan kegaiatan, khususnya antara kabupaten/kota dengan provinsi maupun dengan pusat;

> Perlunya komitmen dalam kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi

Barat dengan semua stake holder, lintas sektor dan lintas program dalam

pelaksanaan pembangunan kesehatan;

Perlunya kebijakan strategis dalam mencapai hasil kinerja yang

diharapkan, khususnya dalam mendukung Sulawesi Barat sejahtera dan

mandiri.

Perlunya pengawalan, monitoring dan evaluasi dalam implementasi

Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan yang telah disusun.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 untuk SKPD Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, semoga dapat menjadi bahan

pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Mamuju, 13 Februari 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT

dr. Achmad Azis, M.Kes

Pembina Utama Madya

NIP. 19590515 198905 1 016

### LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (FISIK DAN KEUANGAN) SUMBER DANA : APBD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016

Unit Kerja : DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT

 Tahun
 : 2016

 Sumber Dana
 : APBD

							вовот	REAL	ISASI		
NO		PROGRAM/KEGIATAN	'	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	KEGIATAN	KEUA	NGAN		SISA PAGU ANGGARAN
								RP	(%)	ттв	
1		2		3	4	5	6	9	10	11	12
В	BELA	NJA LANGSUNG	284	KEG		12,953,526,200.00	100.00	9,942,382,102	76.75		3,063,664,086.00
1	Prog	ram Pelayanan Administrasi Perkantoran	142	KEG		1,170,875,599	9.04	1,073,742,871	91.70		149,652,716
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	BLN	Provinsi	153,600,000	1.19	152,701,733	99.42	1.18	898,267
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	BLN	Provinsi	206,145,599	1.59	150,823,698	73.16	1.16	55,321,901
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	38	Unit	Provinsi	26,500,000	0.20	17,434,740	65.79	0.13	9,065,260
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	BLN	Provinsi	29,040,000	0.22	28,900,000	99.52	0.22	140,000
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12	BLN	Provinsi	49,000,000	0.38	32,195,000	65.70	0.25	16,805,000
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	BLN	Provinsi	66,140,000	0.51	66,126,000	99.98	0.51	14,000
	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	BLN	Provinsi	27,000,000	0.21	27,000,000	100.00	0.21	-
	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	PT	Provinsi	41,640,000	0.32	38,928,000	93.49	0.30	2,712,000
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	BLN	Provinsi	6,360,000	0.05	4,920,000	77.36	0.04	1,440,000
	10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12	BLN	Provinsi	240,000,000	1.85	239,930,700	99.97	1.85	69,300
	11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	6	Kab	Provinsi	265,450,000	2.05	264,783,000	99.75	2.04	667,000
	12	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	1	PT	Provinsi	60,000,000	0.46	50,000,000	83.33	0.39	10,000,000
2	Prog	ram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32	KEG	Provinsi	343,835,000	2.65	291,315,012	84.73	2.25	52,519,988
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12	BLN	UPTD Poliklinik	72,035,000	0.56	70,260,000	97.54	0.54	1,775,000
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12	BLN	Provinsi	144,800,000	1.12	110,621,850	76.40	0.85	34,178,150
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20 ι	Jnit	Provinsi	127,000,000	0.98	110,433,162	86.96	0.85	16,566,838

3	Progr	ram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	KEG	Provinsi	128,700,000	0.99	126,850,000	98.56	0.98	1,850,000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	KL	Provinsi	128,700,000	0.99	126,850,000	98.56	0.98	1,850,000
4	_	ram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian rja dan Keuangan	19	KEG	Provinsi	208,070,000	1.61	179,036,000	86.05	1.38	29,034,000
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	KL	Provinsi	8,050,000	0.06	8,050,000	100.00	0.06	-
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1	Lap	Provinsi	12,020,000	0.09	12,004,000	99.87	0.09	605,000
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	Lap	Provinsi	12,520,000	0.10	11,915,000	95.17	0.09	605,000
	4	Penyusunan RKA / DPA SKPD	1	Lap	Provinsi	17,900,000	0.14	17,185,000	96.01	0.13	5,130,000
	5	Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD	1	Lap	Provinsi	26,230,000	0.20	21,100,000	80.44	0.16	5,130,000
	6	Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan Bendahara	12	BLN	Provinsi	89,400,000	0.69	72,932,000	81.58	0.56	16,468,000
	7	Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan	1	Lap	Provinsi	37,950,000	0.29	31,850,000	83.93	0.25	6,100,000
	8	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	1	Lap	Provinsi	4,000,000	0.03	4,000,000	100.00	0.03	-
5		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10	KEG	Provinsi	7,791,515,000	60.15	5,482,926,318	70.37	42.33	2,308,588,682
	1	Pemantauan indikator Penggunaan Obat Rasional di PKM Perawatan	3	PT	Provinsi	29,030,000	0.22	24,895,000	85.76	0.19	4,135,000
	2	Pemantauan ketersediaan obat dan Vaksin	4	PT	Provinsi	29,630,000	0.23	18,875,000	63.70	0.15	10,755,000
	3	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat	2	PT	Provinsi	17,550,000	0.14	15,800,000	90.03	0.12	1,750,000
	4	Pelayanan Kefarmasian	1	PT	Provinsi	7,715,305,000	59.56	5,423,356,318	70.29	41.87	2,291,948,682
6		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12	DESA	Provinsi	44,600,000	0.34	40,020,000	89.73	0.31	4,580,000
	1	Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Tk. Provinsi	6	КАВ	Provinsi	24,910,000	0.19	22,210,000	89.16	0.17	2,700,000
	2	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan program Kesetradkom	6	КАВ	Provinsi	19,690,000	0.15	17,810,000	90.45	0.14	1,880,000
7		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	KEG	6 Kab	96,960,001	0.75	96,960,001	100.00	0.75	-
	1	Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan	1	Lap		96,960,001	0.75	96,960,001	100.00		-
8		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	6	KEG	6 Kab	599,525,000	4.63	474,689,000	79.18	3.66	124,836,000

	1	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pemetaan Masalah Gizi di	1	Lap	Provinsi	126,104,000	0.97	124,255,000	98.53	0.96	1,849,000
	2	Pelatihan Motivator ASI *	2	Lap	UPTD IFP	149,630,000	1.16	140,860,000	94.14	1.09	8,770,000
	3	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pembentukan Kelompok P	3	Lap	Provinsi	323,791,000	2.50	209,574,000	64.73	1.62	114,217,000
9		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	7	KEG	UPTD IFP	317,817,300	2.45	299,552,300	94.25	2.31	18,265,000
	1	Pemicuan Jamban Sehat	6	KAB	6 Kab	257,460,000	1.99	239,195,000	92.91	1.85	18,265,000
	2	Pertemuan jejaring STBM	1	Lap	6 Kab	60,357,300	0.47	60,357,300	100.00	0.47	-
10		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	7	KEG	UPTD IFP	130,250,000	1.01	111,990,000	85.98	0.86	18,260,000
	1	Pelacakan Kasus Malaria	6	КАВ	Provinsi	68,750,000	0.53	63,240,000	91.99	0.49	5,510,000
	2	Cold Room	1	PT	Provinsi	61,500,000	0.47	48,750,000	79.27	0.38	12,750,000
11		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	16	KEG	Provinsi	1,265,539,400	9.77	1,232,243,700	97.37	9.51	33,295,700
	1	Perencanaan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	1	LAP	Provinsi	115,437,000	0.89	105,927,000	91.76	0.82	9,510,000
	2	Monitoring dan Evaluasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5	КАВ	Provinsi	97,230,000	0.75	95,000,000	97.71	0.73	2,230,000
	3	Peningkatan program PONEK di RS	1	LAP	Provinsi	237,141,900	1.83	235,196,900	99.18	1.82	1,945,000
	4	Pelatihan perawatan pelaksana puskesmas *	1	LAP	6 Kab	189,125,500	1.46	189,122,500	100.00	1.46	3,000
	5	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar	6	LAP		47,665,000	0.37	47,217,000	99.06	0.36	448,000
	6	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan di DTPK dan Lokasi Bai	1	LAP	Provinsi	38,940,000	0.30	37,940,000	97.43	0.29	1,000,000
	7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD Poliklinik	1	LAP	6 Kab	540,000,000	4.17	521,840,300	96.64	4.03	18,159,700

12		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3	KEG	6 Kab	504,730,000	3.90	301,290,000	59.69	2.33	203,440,000
	1	Peningkatan pelayanan Kespro yg responsif gender	1	LAP	Provinsi	200,000,000	1.54	-	0.00	0.00	200,000,000
	2	Penguatan Kemitraan Bidan dan Dukun untuk PKM	1	LAP	BKTM Makassar	200,000,000	1.54	197,040,000	98.52	1.52	2,960,000
	3	Pelatihan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)	1	LAP		104,730,000	0.81	104,250,000	99.54	0.80	480,000
13		Program Kebijakan dan Management Pembangunan kesehatan	19	KEG	6 Kab	229,173,900	1.77	161,281,900	70.38	1.25	67,892,000
	1	Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Provinsi	1	LAP	Provinsi	22,614,900	0.17	22,614,900	100.00	0.17	-
	2	Monev Laporan Keuangan dan Aset Negara	6	KAB		44,020,000	0.34	29,637,000	67.33	0.23	14,383,000
	3	Kalakarya Kesehatan	12	DESA	Provinsi	162,539,000	1.25	109,030,000	67.08	0.84	53,509,000
14		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	KEG	Provinsi	60,705,000	0.47	48,705,000	80.23	0.38	12,000,000
	1	Penilaian Tenaga kesehatan Teladan di Puskesmas	3	Regional	Provinsi	60,705,000	0.47	48,705,000	80.23	0.38	12,000,000
15		Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	6	KEG		61,230,000	0.47	21,780,000	35.57		39,450,000
	1	Pengembangan SIK	6	KAB	Provinsi	61,230,000	0.47	21,780,000	35.57	0.17	39,450,000